

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Ermansjah, Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Hs, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kanter, E.Y., *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta, Stora Grafika, 2001.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Edisi 1 Cetakan 2, Bandung, 2012.
- Nurdewata, Mukti Fajar, et.al., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Purnadi Purbacaraka, et.al, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Soemoatmodjo, Soetardjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sulhan, et.al, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018.
- Waluyo, Dody Radjasa, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, 2001.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 112 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113).

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24).

C. Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi), Makalah

Adjie G Rinepta, 2023, *Perjalanan Kasus Lurah Caturtunggal Agus Santoso Hingga Divonis 8 Tahun Bui*, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7113313/perjalanan-kasus-lurah-caturtunggal-agus-santoso-hingga-divonis-8-tahun-bui/2>, (diakses pada 13 Mei 2024).

Putsanra, Videlia, Dipna, “Asal Usul Tanah Desa: Dari Kepunyaan Negara jadi Milik Keraton”, https://tirto.id/asal-usul-tanah-desa-dari-kepunyaan-negara-jadi-milik-keraton-gjHZ#google_vignette, (diakses 11 September 2024).

Hidayat, Reza, “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)”, *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3, Nomor 12, (Desember 2015): hlm.02928, <https://media.neliti.com/media/publications/152971-ID-penyertaan-dalam-tindak-pidana-korupsi-t.pdf>, (diakses 12 September 2024).

Sjafrina, Almas, et.al, “Cegah Korupsi Dana Desa”, <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>, (diakses 01 November 2024).

D. Internet

Dinas Pertanian dan Tata Ruang, *Peraturan Gubernur DIY Nomoe 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan*, Pengumuman, <https://pertaru.slemankab.go.id/24941/peraturan-gubernur-diy-nomor-24-tahun-2024-tentang-pemanfaatan-tanah-kalurahan/> (diakses pada 22 September 2024).

Haris, Firdaus, “Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Sleman, Lurah Caturtunggal Jadi Tersangka”, Kompas, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/17/korupsi-pemanfaatan-tanah-kas-desa-di-sleman-lurah-caturtunggal-jadi-tersangka>, (diakses 4 Desember 2024).

Haris, Firdaus, “Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Sleman, Lurah Maguwoharjo Tersangka”, Kompas, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/02/penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-sleman-lurah-maguwoharjo-tersangka>, (diakses 4 Desember 2024).

Putsanra, Videlia, Dipna, “Asal Usul Tanah Desa: Dari Kepunyaan Negara jadi Milik Keraton”, Tirto, https://tirto.id/asal-usul-tanah-desa-dari-kepunyaan-negara-jadi-milik-keraton-gjHZ#google_vignette, (diakses 11 September 2024)

Sunarto, “Kronologi Kasus Mafia Tanah Kas Desa Menyeret Lurah Candibinangun Pakem, Berawal Rencana Dibangun Waterpark”, *Harian* Jogja, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/02/07/510/1164120/kronologi-kasus-mafia-tanah-kas-desa-menyeret-lurah-candibinangun-pakem-berawal-rencana-dibangun-waterpark#google_vignette , (diakses 4 Desember 2024).

Zuhari Salam Asoni, “Kekuatan Pembuktian Waarmerking Penobatan Paku Alam Ix Al- Haj Berdasarkan Rapat Keluarga Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017), *Indonesian Notary*, Vol. 4. No. 1, 2022.